

LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : BJ 2182-VIII/2018
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Permohonan Izin Penelitian Wawancara dan Permintaan Data.

Bogor, 31 Agustus 2018

Kepada
Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran di
Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5, Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Damai Dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan TA. 2017/2018.
2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Elya Tanzila, NIM: 120170303008, Nomor HP: 082112563419, email: elya.tanzila@kn.idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mencegah Konflik Agama Guna Mempertahankan Status *Zero Conflict* Di Wilayah Sumatera Selatan."
3. Mohon konfirmasi waktu dan pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person*: HP 082112563419 a.n Elya Tanzila.
4. Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

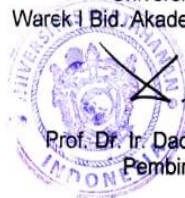
1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
2. Sekjen Kemhan
3. Rektor Unhan
4. Pangdam II Sriwijaya
5. Kapolda Sumatera Selatan
6. Dekan FKN Unhan
7. Karo AK Unhan.


Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : B/ 2182 /VIII/2018
Tanggal : 31 Agustus 2018

DAFTAR PEJABAT

1. Asintel Kasdam II Sriwijaya
2. Aster Kasdam II Sriwijaya
3. Kabid Intelkam Polda Sumatera Selatan
4. Kabid Binmas Polda Sumatera Selatan
5. Kakesbangpol Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan
7. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Perwakilan tiap Agama
8. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palembang
9. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Sumatera Selatan

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,




Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

No	Teori	Indikator	Daftar Pertanyaan	Narasumber/Informan
	<p>Overview</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kondisi keamanan masyarakat terkait konflik SARA di Sumatera Selatan? 2. Apakah selama ini Sumatera Selatan memang belum pernah mengalami konflik SARA? 3. Secara umum, mengapa Sumatera Selatan bisa kondusif dan terbebas dari konflik SARA? 4. Kapan <i>Zero Conflict</i> dicetuskan? Dan siapa pertama kali yang mencetuskan? 5. Apa saja indikator dari suatu daerah sehingga bisa diberikan status <i>Zero Conflict</i>? 6. Apa dampak positif dari kondisi zero conflict di Sumsel? 7. Apa peran instansi Bapak/Ibu dalam menangani kasus SARA di Sumatera Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan 2. Kodam II/Sriwijaya 3. Polda Sumatera Selatan 4. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan 5. Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Selatan 6. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan

1	Konflik	Source (akar konflik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Sumatera Selatan benar-benar sudah berhasil memangkas habis akar masalah sehingga konflik SARA tidak terjadi di Sumsel? 2. Apakah benar sudah tidak ada akar konflik yang mungkin suatu saat dapat memicu munculnya konflik SARA? Terutama konflik agama? 3. Bagaimana kondisi umat beragama di Sumsel? 4. Apakah belum pernah terjadi ketegangan antar umat beragama? 5. Bagaimana dengan internal muslim? Di beberapa provinsi ketegangan terjadi karena perbedaan pandangan antar umat muslim sendiri (antara moderat dan ekstrimis), bagaimana dengan kondisi di Sumatera Selatan? 	
		Akselerator	Apakah pernah ada isu yang diangkat oleh suatu pihak sehingga memicu terjadinya konflik agama?	
		Trigger (pemicu konflik)	Apakah pernah terjadi insiden atau perselisihan yang dapat memicu terjadinya konflik agama?	

2	Strategi	<i>Way</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Selatan untuk mencegah konflik SARA? 2. Bagaimana strategi pemerintah Sumatera Selatan dalam mencegah terjadinya konflik Agama? 3. Langkah apa yang diambil pemerintah untuk menanggulangi konflik agama agar tidak meluas? 4. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi strategi tersebut? 	
		<i>End</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa tujuan utama pemerintah Sumatera Selatan dalam mempertahankan status <i>zero conflict</i>? 	
		<i>Means</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resource apa saja yang digunakan oleh pemerintah Sumatera Selatan untuk mencegah terjadinya konflik agama? 2. Apakah terdapat instansi/lembaga yang secara khusus ditugaskan untuk mengatasi potensi terjadinya konflik agama? 3. Bagaimana sinergitas antar lembaga tersebut dalam menangani konflik agama? 	

3	CEWERS		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pemerintah membentuk CEWERS dalam mengatasi konflik SARA? 2. Bagaimana CEWERS dalam mencegah konflik Agama di Sumsel? 3. Siapa saja aktor yang berperan dalam pelaksanaan CEWERS? 4. Bagaimana metode CEWERS yang dilakukan oleh pemerintah Sumsel? 5. Langkah-langkah apa saja yang ditempuh pemerintah dalam CEWERS? 	
4	Damai		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sudah tercipta kesetaraan sosial, ekonomi, budaya dalam masyarakat Sumsel? 2. Apakah semua umat beragama mendapatkan fasilitas/kemudahan yang sama dalam mengakses ruang publik? 	
5	Kemanan Nasional		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sinergitas antar lembaga atau instansi dalam mewujudkan keamanan wilayah Sumsel? 2. Apakah kondisi <i>zero conflict</i> ini membawa pengaruh besar dalam keamanan wilayah sumsel dan keamanan nasional? 	

Lampiran 3

CATATAN HASIL WAWANCARA

Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
Muhammad Ali Amin, S.Pd., M.Si. Kasubid Kewaspadaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Bagaimana kondisi <i>zero conflict</i> di Sumatera Selatan?	zero conflict mulai dicetuskan pada tahun 2017 oleh Bapak Alex Noerdin. zero conflict bermakna bahwa Sumatera Selatan merupakan daerah yang aman dari gangguan keamanan sosial.
	Apakah di Sumsel pernah terjadi konflik SARA terutama konflik agama?	Hingga sekarang Sumatera Selatan belum pernah mengalami konflik SARA terutama agama. Dan dalam catatan saya, selama ini hanya terjadi dua peristiwa. Yang pertama terjadi di daerah Kertapati (pembangunan Vihara), dan yang kedua yaitu perehaban Gereja (memperbesar Gereja) namun kedua konflik tersebut telah diselesaikan melalui FKUB. Jadi masalah agama yang terjadi Sumatera Selatan bukan karena konteks (isi agama) namun lebih kepada permasalahan pembangunan rumah ibadah yang kemudian dapat dengan mudah diselesaikan.
	Mengapa Sumatera Selatan belum pernah mengalami konflik SARA terutama konflik agama?	Terkait dengan konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), wilayah Sumatera Selatan memiliki 17 kabupaten dan kota yang memiliki berbagai suku dan agama. Pembauran suku dan agama tersebut terutama terdapat di kota Palembang. Dalam isu agama, 90% warga Sumatera Selatan beragama Islam. Masyarakat kota Palembang sudah memiliki pemikiran yang demokratis dan nasionalis. Selain itu, hubungan antar masyarakat berbeda agama di Sumatera Selatan tetap harmonis juga dikarenakan dalam pergaulan sehari-hari mereka tidak membicarakan soal agama melainkan soal pekerjaan, dan kehidupan sosial lain sehingga tidak muncul adanya gesekan antar umat atau konflik agama di Sumatera Selatan. Walaupun begitu, kita tetap berupaya untuk meminimalisir adanya potensi konflik terutama di kota Palembang.

	Apakah pernah ada isu yang diangkat oleh suatu pihak sehingga memicu terjadinya konflik agama?	Belum pernah. Karena setiap potensi konflik yang muncul selalu dapat kita redam dengan cepat sebelum menyebar luas ke masyarakat.
	Upaya apa yang dilakukan pemerintah Sumsel dalam pencegahan konflik agama?	<p>Pemerintah melalui badan Kesbangpol, melakukan kerjasama dengan berbagai instansi baik kepolisian, TNI, BIN, maupun kejaksaan. Kita menggali informasi dan melakukan deteksi dini terhadap hal-hal yang bisa menjadi pemicu konflik. Jadi, kesbangpol merupakan wadah untuk mengadakan perkumpulan berbagai instansi. Kesbangpol berfungsi untuk menyatukan berbagai instansi tersebut. Kesbangpol menjadi tangan untuk instansi-instansi tersebut guna menyampaikan berbagai informasi terkait potensi konflik ke Gubernur. Jadi apabila konflik tersebut terlihat penting dan sulit diatasi, kita akan mengadakan rapat koordinasi. Namun, jika permasalahannya masih dalam skala kecil, diusahakan untuk dapat diatasi pada level bawah. Jadi setiap kesbangpol baik provinsi maupun kota dan kabupaten melakukan SOP yang sama. Kesbangpol tingkat kabupaten setiap hari mengirimkan laporan-laporan ke kesbangpol provinsi, sehingga setiap potensi konflik dapat diatasi dengan cepat. Sehingga potensi konflik tersebut tidak tumbuh menjadi konflik yang nyata.</p> <p>Selain itu, Kita juga membangun FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dimana terdapat perwakilan dari setiap Agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) yang bekerja sama dengan kepentingan agama. Jadi jika terdapat permasalahan atau potensi konflik agama, kesbangpol mengajak FKUB untuk melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait konflik untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.</p>

	<p>Apa saja faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja kesbangpol dalam pencegahan konflik agama?</p>	<p>Untuk di pemerintahan, kita kekurangan personil yang memiliki kemampuan. Sebenarnya jumlah pegawai banyak, namun yang memiliki kemampuan masih sangat sedikit. Di kesbangpol ada beberapa pegawai yang dididik sama seperti pendidikan tingkat kepolisian dan TNI terutama di bidang kewaspadaan dan deteksi dini atau bisa disebut intel. Di Sumatera Selatan, kita kekurangan orang-orang yang seperti itu. Terutama di tingkat kabupaten. Karena kunci utama zero conflict adalah bagaimana kecepatan dan ketepatan untuk memperoleh informasi awal. Kalau informasi awal sudah kita terima, walaupun hanya isu, dapat kita redam sehingga tidak berkembang menjadi konflik. Dan untuk tugas tersebut harus diisi oleh orang-orang khusus yang memiliki kemampuan. Kemudian, faktor penghambat lain, tidak semua instansi mau membuka informasi. Sehingga kita harus mencari cara lain untuk mendapatkan informasi.</p>
	<p>Apa manfaat dari kondisi <i>Zero Conflict</i> di Sumatera Selatan?</p>	<p>Sumatera Selatan dapat dikenal baik di Indonesia maupun di luar negeri. Hal tersebut berguna untuk mengundang investor masuk ke Sumatera Selatan untuk menanamkan modalnya di Sumatera Selatan. Dengan begitu, akan terbuka lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dapat diminimalisir. Salah satu kriteria agar investor mau menginvestasikan modalnya adalah rasa aman. Apabila suatu daerah tersebut tidak aman, tidak ada investor yang mau berinvestasi di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Sumatera Selatan berusaha untuk mempromosikan Sumatera Selatan sebagai daerah <i>zero conflict</i>.</p>
	<p>Apakah di Kesbangpol terdapat sistem deteksi dini dan tanggap dini?</p>	<p>Kita menggali informasi dan melakukan deteksi dini terhadap hal-hal yang bisa menjadi pemicu konflik. Kita juga memiliki Tim Terpadu Penanggulangan Konflik Sosial untuk mengatasi potensi konflik yang timbul di Sumatera Selatan</p>
<p>AKBP Hery Widagdo, S.E., M.M</p>	<p>Apakah pernah terjadi konflik SARA terutama agama di Sumatera Selatan?</p>	<p>Hingga saat ini, Sumsel belum pernah mengalami konflik SARA terutama agama. Kondisi di Sumsel relatif aman dan damai.</p>
<p>Wadir Intelkam Polda Sumatera</p>	<p>Mengapa Sumsel bisa</p>	<p>Karena memang masyarakatnya yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap</p>

Selatan	kondusif?	perbedaan. Selain itu, mereka kurang suka untuk mencampuri urusan agama orang lain.
	Upaya apa yang dilakukan Polda dalam menjaga kondusivitas di Sumsel?	Dalam menjaga kondusivitas dan mengatasi konflik agama, Polda Sumsel berpedoman pada UU Penanganan Konflik Sosial No. 7 Tahun 2012. Polda Sumsel beserta jajaran telah melaksanakan secara pro aktif dalam hal penanganan konflik sosial dengan melakukan mapping dan penggalangan sebagai upaya untuk meredam agar potensi konflik sosial tidak berkembang menjadi sebuah kekerasan. Dalam hal penanganan potensi konflik sosial harus dilaksanakan secara terpadu dengan saling menjunjung antara instansi terkait termasuk peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dll. Selain itu, Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan strategi yang digunakan dalam melaksanakan tugas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Polda juga melakukan “deklarasi anti hoaks” di kalangan kelompok nasionalis. Sebagai contoh kejadian pengrusakan di Gereja Santo Zakaria di daerah Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir. Polda dengan cepat dapat merespon hal tersebut.
	Bagaimana sistem peringatan dini dan respon dini di Sumsel?	Polda Sumatera Selatan juga melakukan sistem peringatan dini dan Intelijen melakukan penggalangan.
	Apakah kondisi Sumsel benar-benar damai?	Untuk kondisi damai di Sumsel, memang selama ini konflik SARA belum pernah terjadi di Sumsel. Hanya saja, konflik-konflik lain atau kriminalitas masih sering terjadi. Seperti adanya begal, pembunuhan, pencurian. Jadi Sumsel sendiri masih tergolong damai negatif.
	Apa manfaat kondisi zero conflict di Sumsel untuk Sumsel dan Indonesia pada umumnya?	Kondisi <i>zero conflict</i> tentu sangat bermanfaat bagi sumsel untuk mengundang para investor menanamkan modalnya. Kondisi aman ini juga sangat menguntungkan bagi masyarakat Sumsel. Selain itu, untuk Indonesia, kondisi ini tentu membantu kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia. Akan lebih baik jika seluruh provinsi Indonesia berada dalam kondisi <i>zero conflict</i> .
	Apa hambatan yang dihadapi oleh Polda	Hambatan yang dihadapi oleh Polda sebenarnya klasik. Seperti sarana dan prasarana yang belum optimal sehingga menghambat Polda untuk menjangkau

	Sumsel dalam menghadapi potensi konflik agama?	daerah konflik. Hambatan lain yang dihadapi yaitu kesigapan lintas sektoral dimana terkadang ketika Polda harus berkoordinasi dengan sektor atau instansi lain, sektor tersebut bekerja lamban. Kurangnya masing-masing stakeholder dalam memahami konflik.
Mayor Ali Rahim Staf Intel Kodam II/Sriwijaya	Apakah di Sumatera Selatan pernah ada konflik SARA terutama konflik agama?	Di sini tidak pernah terjadi konflik SARA. Lebih banyak konflik lahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan. Jadi di Sumatera Selatan memang relatif aman dan kondusif. Untuk konflik SARA kita sampai saat ini <i>zero conflict</i> . Sejauh ini, konflik yang berpotensi nuansa agama belum pernah terjadi di Sumatera Selatan.
	Mengapa Sumsel bisa aman?	Sebenarnya kalau kita berbicara dalam ruang lingkup yang lebih luas, bisa jadi karena karakteristik masyarakat.
	Bagaimana upaya TNI dalam pencegahan konflik agama di Sumsel?	Kita ada melaksanakan kegiatan intelijen dengan melakukan penggalangan terbatas kepada masyarakat. Dalam artian kita mencoba memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat sehingga dengan upaya kita melaksanakan penggalangan, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu yang bertujuan untuk merusak dan menciptakan kondisi tidak nyaman di wilayah Sumatera Selatan ini. Di samping itu juga ada keterlibatan unsur lain, misalnya Babinsa yang secara keseharian mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi Babinsa ini memberikan pencerahan ke masyarakat, memberikan informasi-informasi ke masyarakat ketika muncul polemik-polemik yang mengarah kepada potensi konflik terutama berkenaan dengan SARA sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi. Selain itu, Kita dalam penanganannya tidak berdiri sendiri. Artinya banyak melibatkan unsur-unsur terkait di Provinsi, misalnya disitu ada Kesbangpol, Kepolisian, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat. Sehingga ada sinergitas dari unsur-unsur tersebut tadi dan dapat meredam potensi konflik dengan cara persuasif. Kita semaksimal mungkin untuk mencegah munculnya konflik.
	Bagaimana sinergitas antar lembaga di wilayah Sumatera Selatan?	Selama ini kerjasamanya sangat solid, sehingga mampu mengatasi potensi konflik yang muncul. Semua unsur dapat bekerja sama dengan baik sesuai bidang dan kapasitasnya masing-masing. Dan hal itu berjalan dari tingkat pimpinan hingga bawahan.

	<p>Adakah faktor penghambat yang dihadapi dalam mengatasi potensi konflik agama?</p>	<p>Sejauh ini belum ada hambatan yang berarti. Semuanya bisa teratasi dengan baik oleh aparat di wilayah.</p>
	<p>Apakah kondisi zero conflict membawa pengaruh besar bagi Sumatera Selatan?</p>	<p>Jelas. Dengan adanya <i>zero conflict</i> di Sumatera Selatan sangat berpengaruh positif terhadap semua aspek kehidupan baik dari bidang ekonomi, sosial budaya, ideologi, maupun keamanan sendiri. Karena dengan adanya zero conflict, orang maupun pelaku usaha dan komponen-komponen lain di dalam masyarakat, mereka tidak merasa khawatir untuk melakukan kegiatan baik dalam bentuk investasi maupun kegiatan lain. Ada munculnya rasa keamanan. Kodam dan seluruh elemen di Sumatera Selatan berusaha untuk menjaga kondisi ini, jadi ada semacam rasa ingin mewujudkan atau menjadikan Sumatera Selatan seperti rumah sendiri. Jadi kalau di rumah sendiri itu, ada muncul rasa aman dan nyaman. Jadi, dengan adanya zero conflict kita ingin menumbuhkan rasa aman di wilayah Sumatera Selatan.</p>
<p>Rivai Saidi Staf Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan</p>	<p>Bagaimana kondisi umat beragama di Sumsel?</p>	<p>Kalau gambaran secara umum, Sumatera Selatan memang kondusif. Kalau dibilang Zero Conflict ya bisa. Namun masih ada sedikit benturan-benturan yang terjadi di beberapa titik. Bahkan di dalam umat Islam sendiri kan banyak golongan-golongan. yang ditakutkan itu ya adanya aliran-aliran sempalan seperti Gerakan Fajar Nusantara atau Ahmadiyah.</p>
	<p>Bagaimana dengan kondisi benturan agama di Sumsel?</p>	<p>Konflik antar umat beragama: jarang bahkan hampir tidak pernah terjadi benturan. Karena sesungguhnya setiap agama mengajarkan kebaikan. Dan masyarakat di Sumatera Selatan memiliki kesadaran yang tinggi akan toleransi. Serta tokoh agama yang selalu memberikan nasehat dan wejangan mengenai kerukunan umat beragama. Konflik intern umat. Artinya ini kan konflik di dalam tubuh agama itu sendiri. Biasanya umat yang ekstrimis atau radikal ini yang memicu percikan. Namun di Sumatera Selatan, hal tersebut tidak muncul. Konflik antara umat dengan umat yang dianggap sesat. Ini yang sering menyulut</p>

		<p>karena paham yang mereka sebarkan itu tidak sesuai. Sebetulnya di Sumatera Selatan ini ada. Hanya saja, kita dalam menghadapi hal tersebut lebih mengedepankan komunikasi dan persuasi. Contohnya kita pernah mengadakan komunikasi dengan Gerakan Fajar Nusantara di Banyuasin. Sebetulnya belum ada benturan yang berarti. Namun memang ada beberapa oknum yang tidak suka dengan kondusifitas negara kita. Contoh kasus di Ogan Ilir, terdapat oknum yang merusak/melempar gereja. Itu sebetulnya oknum yang melakukan hal tersebut, bukan golongan/umat agama tertentu. alhamdulillah, kejadian tersebut dapat segera ditangani dan tidak meluas.</p>
	<p>Mengapa Sumsel bisa kondusif?</p>	<p>Kalau dilihat dari sejarah, Sumatera Selatan kan di abad 7 adalah Hindu/Budha. Kultur budaya yang telah mengakar kuat dan mengeratkan persatuan di wilayah Sumatera Selatan. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan toleransi. Selain itu, karakteristik masyarakat Sumatera Selatan yang memiliki sifat “tidak mau diganggu dan tidak mau mengganggu” artinya “silahkan kalian menjalankan ibadah kalian tapi jangan sampai mengusik agama lain dan juga kesepakatan yang sudah ada” juga menjadi faktor pendukung Sumatera Selatan bisa kondusif</p>
	<p>Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi potensi konflik agama?</p>	<p>Melaksanakan pembinaan, pelayanan dan bimbingan kerukunan umat beragama. Jadi pembinaan itu, kita lebih mengikat dan lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan pembinaan. Contohnya: pembinaan dalam bentuk workshop dan dialog. Dalam tahun ini saja, alhamdulillah kementerian agama, khususnya bagian Kerukunan Umat Beragama telah menjalankan 7 kegiatan pembinaan pada tahun ini. Termasuk di dalamnya pembinaan kepada ASN, pembinaan kepada para tokoh-tokoh agama, kemudian dialog antar umat beragama. Kemudian kita sekarang juga menjajaki untuk membangun desa kerukunan umat beragama provinsi Sumatera Selatan dan sudah ada 2 Kabupaten yang kita seleksi yaitu Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Banyuasin. Jadi dua Kabupaten ini yang akan kita galakkan untuk menjadi desa kerukunan. Kita juga sudah terjun langsung ke Kabupaten tersebut, kita telah melihat kehidupan masyarakatnya secara langsung, kultur mereka, kemudian bagaimana kehidupan kerukunan antar umat beragama mereka. Dan mereka memang patut untuk dicontoh. Dalam hal pelayanan. Kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait</p>

		informasi data-data ulama, dan sebagainya. Selain itu, melaksanakan bimbingan pada lembaga agama, sosial, dan organisasi masyarakat. Jadi kita tidak hanya sebatas mengadakan pembinaan terhadap tokoh agama, melainkan juga kepada organisasi kemasyarakatan. Artinya kita bersinergi, bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, NU, Muhammadiyah, organisasi pemuda juga. Sekarang ini kita sudah punya Forum Pemuda Umat Beragama. Di dalam Forum Pemuda Umat Beragama tersebut sudah termasuk di dalamnya HMI, PMII, PHDI, Pemuda Katolik. Jadi tidak hanya bersinergi dengan organisasi Islam. Jadi jaringan kita sudah luas.
	Apa manfaat dari kondisi <i>zero conflict</i> di Sumsel?	Banyak. Salah satunya adalah munculnya rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, dengan kondisi <i>zero conflict</i> , pembangunan di Sumsel juga akan berkembang lebih baik karena banyaknya investor yang datang ke Sumsel.
Prof. Aflatun Muchtar Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Selatan (FKUB Sumsel).	Apakah di Sumatera Selatan pernah terjadi konflik agama?	Hingga saat ini belum pernah.
	Bagaimana potensi konflik agama di Sumatera Selatan dan bagaimana mencegahnya?	Selama ini yang kita lakukan yaitu koordinasi dan komunikasi antar instansi. Hal ini tidak terlepas dari Kementerian Agama (binmas dari berbagai agama) yang mana komunikasinya berjalan dengan baik. Kita juga tidak terlepas dari Majelis Ulama karena mayoritas warga beragama Islam. Kemudian kita juga menyerukan pada perwakilan tiap-tiap agama untuk melakukan sosialisasi kepada umatnya masing-masing hal-hal apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hal menjaga kerukunan umat beragama. Dimana masalah yang boleh dibahas hanyalah terikat masalah sosial, ekonomi, dll namun jangan sampai membahas masalah aqidah. Antara tokoh-tokoh agama juga mengadakan pertemuan dan diskusi untuk menghasilkan toleransi, saling menghargai dan yang paling penting tidak menjadi provokator. Kemudian, kita juga selalu mengadakan pelatihan-pelatihan atau workshop baik oleh Kementerian Agama maupun FKUB sendiri dengan mengundang para tokoh agama, tokoh pemuda dengan mensosialisasikan bagaimana memelihara tri kerukunan, yaitu: kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.

	<p>Setiap provinsi memiliki FKUB masing-masing, tapi kenapa beberapa provinsi masih mengalami konflik agama, sementara di Sumatera Selatan tetap aman dan damai?</p>	<p>Hal tersebut mengindikasikan bahwa sosialisasi yang dilakukan berjalan dan diimplementasikan dengan baik. Pemerintah memang menciptakan hubungan yang komunikatif antara pemimpin dan tokoh agama. Pemerintah juga mampu menggerakkan berbagai forum/ organisasi untuk mempromosikan nilai-nilai damai. Sehingga dari berbagai sudut organisasi ikut mem-back up terciptanya kedamaian. Tokoh-tokoh agama juga selalu melakukan pembinaan-pembinaan kepada generasi muda. Jadi salah satu kuncinya juga berada di tangan tokoh agama, dimana para pemuka agama tidak memprovokasi kebencian antar umat beragama. Selain itu, masyarakat Sumatera Selatan juga cenderung toleran dan menghargai perbedaan.</p>
	<p>Apa manfaat dari kondisi <i>Zero Conflict</i> di Sumatera Selatan?</p>	<p>Pemerintah dapat melaksanakan program-programnya dengan baik tanpa hambatan. Membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, meningkatkan pendidikan, mensejahterakan masyarakat. Umat beragama juga bisa beribadah dengan tenang tanpa hambatan. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar.</p>
<p>Drs. H. Ong Burlian, M.M.</p> <p>Dosen FISIPOL Chandradimuka sekaligus Ketua FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Sumsel</p>	<p>Bagaimana kondisi keamanan di Sumsel terkait konflik SARA?</p>	<p>Ya Alhamdulillah, Sumatera Selatan hingga saat ini masih kondusif, aman, tenteram dan tidak ada masalah berkaitan dengan konflik SARA. Berkenaan dengan zero conflict, Sumsel kan sering sekali menggelar event event internasional seperti SEA games, Islamic Solidarity Games, Asian Games, untuk menjaga kondusifitas Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan pada masa itu yaitu Alex Noerdin mencanangkan Sumatera Selatan Zero Conflict karena Sumatera Selatan menjadi pusat perhatian dunia.</p>
	<p>Menurut Bapak, apa itu <i>zero conflict</i>?</p>	<p><i>Zero Conflict</i> tidak hanya menyangkut keamanan saja, namun juga mencakup masalah ketertiban masyarakat, infrastruktur, sarana olahraga, <i>airport</i>, akomodasi, konsumsi, termasuk tidak ada masalah mengenai polusi udara, air, tanah. Pada saat itu, Gubernur Sumatera Selatan memberikan perhatian penuh terhadap hal tersebut karena Sumatera Selatan merupakan tuan rumah bagi kegiatan berskala internasional.</p>
	<p>Bagaimana upaya yang</p>	<p>FKDM (forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), FKDM ini dibentuk berdasarkan</p>

	<p>dilakukan FKDM dalam mengatasi potensi konflik agama?</p>	<p>peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2006 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018. Jadi FKDM terbentuk dari mulai tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga tingkat Kelurahan/ desa. Kemudian FKDM sendiri berperan sebagai mata dan telinga pemerintah untuk memantau gejolak, maupun gejala potensi konflik yang mungkin terjadi di masyarakat. Dimana fungsi FKDM sendiri untuk menjangring setiap informasi, menganalisis informasi tersebut. Sesuai dengan tingkatannya, informasi yang didapat tersebut akan diteruskan kepada Gubernur. Sementara FKDM Kabupaten/Kota akan berkoordinasi dengan Bupati, begitu juga dengan FKDM tingkat kecamatan yang akan meneruskan informasinya ke Camat. Jadi peran FKDM itu sebagai mata dan telinga pemerintah untuk memantau setiap gejala-gejala konflik yang akan timbul dalam kehidupan masyarakat. Anggota FKDM terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi, serta tokoh pemuda. Dan pengurus FKDM tidak banyak, maksimal 8 orang dan minimal 6 orang. FKDM bukan merupakan organisasi eksekutor, dia hanya koordinasi. Jadi FKDM hanya melaporkan tentang potensi konflik yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan tingkatannya. FKDM dan Forum-forum lain bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk berkoordinasi. FKDM juga melakukan sosialisasi mengenai ruang lingkup kerja FKDM.</p>
	<p>Apa hambatan yang dihadapi FKDM selama ini dalam melaksanakan upaya tersebut?</p>	<p>tidak ada masalah berarti yang dihadapi. Hanya saja memang masalah klasik yaitu terkait dana atau anggaran. Kita itu maunya FKDM Provinsi dapat memberikan sosialisasi ke 17 FKDM Kabupaten/Kota.</p>
	<p>Apa manfaat <i>Zero Conflict</i> di Sumatera Selatan?</p>	<p><i>Zero</i>: artinya nol, <i>Conflict</i>: Konflik. <i>Zero conflict</i> merupakan sebuah harapan, keinginan, dan cita-cita masyarakat. Pada dasarnya masyarakat tidak menginginkan sengketa, konflik, dan perselisihan. Tugas Pemerintah dan FKDM untuk mencegah terjadinya konflik. <i>Zero conflict</i> sangat bagus sebagai visi dan misi masyarakat agar dapat menjalankan kehidupannya dengan baik.</p>

Lampiran 4

DOKUMEN PENDUKUNG



Peneliti Bersama pihak Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan



**Peneliti Bersama Wadir Intelkam Polda Sumatera Selatan
AKBP Hery Widagdo, S.E., M.M**



**Hasil Foto Peneliti yaitu Ketua FKDM Sumatera Selatan
Drs. H. Ong Burlian, M.M.**



**Peneliti Bersama Staf Subbidang KUB dan Hukum Kemenag Sumsel
Bapak Rivai Saidi**



**Peneliti Bersama Staf Intelkam Kodam II/Sriwijaya
Mayor Ali Rahim**

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Elya Tanzila lahir di Palembang pada tanggal 6 April 1994. Anak ke-9 dari pasangan Bapak Ahmad Shahi Yakub dan Ibu Masriah. Menyelesaikan pendidikan SD Negeri 164 Palembang lulus tahun 2005, SMP Negeri 46 Palembang lulus tahun 2008, SMA Negeri 6 Palembang lulus tahun 2011, dan Sarjana (S-1) Hubungan Internasional Universitas Riau lulus tahun 2015. Dan pada tahun 2017 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan Program Studi Damai dan Resolusi Konflik. Karya ilmiah yang pernah ditulis adalah skripsi yang berjudul Motivasi Australia Menerapkan Kebijakan Sekuritisasi terhadap *Irregular Maritime Arrivals* (IMA) pada Tahun 2001-2008 yang diterbitkan oleh Universitas Riau.